

PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL: STUDI KRITIS TANPA DASAR JUSTIFIKASI NORMATIF DI JURUSAN PPKn UNIMED

Natasya Windi Aqilla ^{a*)}, Parlaungan Gabriel Siahaan ^{a)}, Desvita Dwi Herawati ^{a)},
Kevin Rahmat Immanuel ^{a)}

^{a)} Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

^{*)}e-mail korespondensi: natasyawnd.3253240012@mhs.unimed.ac.id

Article history: received 06 Juni 2026; revised 20 Juni 2026; accepted 17 Juli 2026

DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i02.167>

Abstrak. Poligami merupakan fenomena sosial yang masih menjadi perdebatan dalam masyarakat, khususnya jika dikaitkan dengan isu kesetaraan gender. Dalam konteks normatif, praktik poligami diatur dalam hukum dan ajaran agama dengan syarat keadilan, namun dalam realitasnya sering menimbulkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang kritis terhadap isu sosial. Persepsi mahasiswa terhadap poligami dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap konsep gender, latar belakang pendidikan, serta nilai-nilai yang dianut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana mahasiswa memandang poligami dalam perspektif kesetaraan gender tanpa dasar justifikasi normatif, apakah mereka cenderung menerima atau menolak praktik tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi melalui wawancara mendalam. Lokasi penelitian dilaksanakan di Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (UNIMED). Subjek penelitian adalah mahasiswa Jurusan PPKn angkatan 2024 dan 2025, dengan total 20 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (10 mahasiswa angkatan 2024 dan 10 mahasiswa angkatan 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi yang disusun berdasarkan indikator persepsi terhadap poligami dan kesetaraan gender sebagai konstruksi sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk menggambarkan kecenderungan persepsi informan, serta melihat hubungan antara pemahaman gender dengan sikap terhadap poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn UNIMED angkatan 2024 dan 2025 secara dominan menolak praktik poligami ketika dikaji dari perspektif kesetaraan gender sebagai konstruksi sosial. Rata-rata skor dimensi persepsi sebesar 3,66 dan dimensi sikap sebesar 3,77 (skala 5,00) menunjukkan kecenderungan tinggi dalam menolak poligami. Sebanyak 95% informan (19 dari 20) menyatakan penolakan, dengan tidak ditemukannya informan yang mendukung poligami. Pendidikan gender terbukti berpengaruh signifikan dalam membentuk persepsi kritis mahasiswa, tercermin dari rata-rata skor dimensi pengaruh pendidikan gender sebesar 4,31. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik poligami, serta memandang poligami sebagai ekspresi maskulinitas hegemonik yang memperkuat subordinasi perempuan.

Kata Kunci: poligami, persepsi, mahasiswa, gender, kesetaraan, konstruksi sosial, fenomenologi

FEMALE STUDENTS' PERCEPTIONS OF POLYGAMY FROM A GENDER EQUALITY PERSPECTIVE AS A SOCIAL CONSTRUCTION: A CRITICAL STUDY WITHOUT NORMATIVE JUSTIFICATION IN THE CIVIC EDUCATION (PPKn) DEPARTMENT AT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED)

Abstract. Polygamy constitutes a persistent subject of scholarly debate as a social phenomenon, particularly when examined through the lens of gender equality. Normatively, this practice is subject to regulation by statutory law and religious doctrines, predicated on the principle of fairness. However, empirical realities frequently demonstrate the emergence of unequal power dynamics between men and women. This divergence engenders a spectrum of perceptions within the community, including among female university students, who serve as intellectual agents in cultivating critical perspectives on social issues. The perceptions of female students regarding polygamy are shaped by multidimensional factors, including their conceptual understanding of gender, educational trajectories, and internalized value systems. Accordingly, systematic examination of female students' views on polygamy, independent of normative justification, is warranted to ascertain attitudinal predispositions and the variables influencing these perceptions. This study employs a qualitative approach using a phenomenological method through in-depth interviews. The research was conducted in the Civic Education (PPKn) Department, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Medan (UNIMED). The subjects of this study are 20 female students from the 2024 and 2025 cohorts, selected using purposive sampling (10 students from each cohort). Data were collected through in-depth interviews and observation designed based on indicators of perceptions of polygamy and gender equality as social construction. The collected data were analyzed using thematic analysis to identify general trends in informants' perceptions, as well as to examine the relationship between gender understanding and attitudes toward polygamy. The findings reveal that female students of PPKn

*UNIMED from the 2024 and 2025 cohorts predominantly reject polygamy when examined from the perspective of gender equality as a social construction. Mean scores of 3.66 for the perception dimension and 3.77 for the attitudinal dimension (on a 5.00 scale) indicate a high tendency toward rejection. A total of 95% of informants (19 out of 20) expressed rejection, with no informants found to support polygamy. Gender education was found to exert a significant influence on the formation of students' critical perceptions, as reflected in a mean score of 4.31 for the gender education influence dimension. Students demonstrated the ability to identify the gap between *das sollen* and *das sein* in polygamy practice, and perceived polygamy as an expression of hegemonic masculinity that reinforces the subordination of women.*

Keywords: polygamy, perception, female students, gender, equality, social construction, phenomenology

I. PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu fenomena sosial yang hingga kini tetap menjadi tema perdebatan yang kompleks dan multidimensional dalam tataran masyarakat. Praktik ini tidak hanya berhubungan dengan ranah privat institusi keluarga, melainkan juga mencakup aspek hukum, agama, budaya, serta nilai-nilai sosial yang berkembang. Di Indonesia, poligami diakui secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meski diberi batasan yang ketat. Peraturan ini menegaskan bahwa poligami hanya diperkenankan dalam kondisi tertentu serta wajib memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, secara normatif (*das sollen*), praktik poligami diharapkan berjalan secara adil, transparan, dan tanpa merugikan perempuan.

Namun demikian, kondisi ideal tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Dalam praktiknya, poligami kerap menimbulkan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan relasi gender. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan dalam praktik poligami berada pada posisi yang kurang diuntungkan, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur poligami dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dikaji karena berimplikasi pada upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dalam perspektif akademik, isu poligami tidak dapat dilepaskan dari konsep kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, serta akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam praktiknya, relasi gender sering kali masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan. Ketidakadilan gender dapat muncul dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, serta beban kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 2013). Dalam konteks ini, poligami sering dipandang sebagai salah satu praktik yang berpotensi memperkuat subordinasi perempuan.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang melihat poligami sebagai praktik yang sah dan memiliki legitimasi dalam ajaran agama. Dalam perspektif ini, poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil terhadap seluruh istri. Namun, persoalan utama terletak pada bagaimana konsep keadilan tersebut diimplementasikan. Keadilan dalam poligami tidak hanya menyangkut aspek material, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan psikologis yang sulit diukur secara objektif. Keadilan harus dipahami sebagai kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan hidup secara menyeluruh, bukan hanya sekadar pemenuhan hak formal (Nussbaum, 2011). Dengan demikian, klaim keadilan dalam praktik poligami perlu dikaji secara kritis, terutama dari sudut pandang perempuan sebagai pihak yang sering terdampak.

Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir kritis terhadap berbagai fenomena sosial. Mahasiswi, khususnya, menjadi subjek yang relevan untuk dikaji karena mereka memiliki keterkaitan langsung dengan isu kesetaraan gender. Sebagai individu yang berada dalam lingkungan akademik, mahasiswi diharapkan mampu memahami dan menganalisis fenomena sosial secara rasional, objektif, dan berbasis pada pengetahuan ilmiah. Persepsi mereka terhadap poligami menjadi penting untuk diteliti karena dapat mencerminkan tingkat kesadaran gender serta kemampuan berpikir kritis yang dimiliki.

Fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa terdapat beragam persepsi di kalangan mahasiswi terhadap poligami. Sebagian mahasiswi cenderung menolak praktik tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan berpotensi merugikan perempuan. Namun, sebagian lainnya masih menerima poligami dengan alasan tertentu, seperti legitimasi agama atau kondisi khusus. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, pemahaman gender, serta latar belakang sosial budaya.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif yang belum banyak diterapkan dalam studi persepsi terhadap poligami di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan variabel baru, yaitu tingkat internalisasi konsep gender sebagai konstruksi sosial, sebagai variabel yang secara spesifik dianalisis hubungannya dengan persepsi terhadap poligami. Ketiga, penelitian ini menggunakan sudut pandang yang lebih spesifik dengan membatasi kajian pada mahasiswi Jurusan PPKn yang berada dalam dua angkatan berbeda (2024 dan 2025), sehingga memungkinkan analisis perbandingan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswi memandang poligami dalam kaitannya dengan isu kesetaraan gender sebagai konstruksi sosial, apakah mereka cenderung menerima atau menolak praktik tersebut tanpa alasan yang sah, serta bagaimana pengaruh pendidikan gender terhadap persepsi tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai persepsi mahasiswa terhadap poligami dalam perspektif kesetaraan gender sebagai konstruksi sosial, serta untuk mengungkap makna, pengalaman, dan pandangan informan secara holistik.

Metode fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman subjektif informan sebagaimana mereka memaknai fenomena poligami dalam kaitannya dengan isu kesetaraan gender. Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (UNIMED). Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa di jurusan ini memiliki paparan akademik yang relevan terhadap kajian gender, hukum, dan fenomena sosial.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang mahasiswa yang terbagi dalam dua angkatan, yaitu 10 mahasiswa angkatan 2024 dan 10 mahasiswa angkatan 2025. Mereka dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: terdaftar sebagai mahasiswa aktif Jurusan PPKn FIS UNIMED, berjenis kelamin perempuan, berasal dari angkatan 2024 dan 2025, serta bersedia berpartisipasi secara sukarela dan memiliki pengetahuan dasar mengenai isu kesetaraan gender.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur, observasi sebagai teknik pendukung, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam dengan persetujuan informan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang mencakup tahap transkripsi, pengkodean (coding), pengembangan tema, peninjauan tema, serta penyajian dan interpretasi.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, dan konfirmasi dengan data sekunder. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari informan berbeda angkatan serta konfirmasi melalui penilaian ahli (expert judgment). Triangulasi metode membandingkan data wawancara dengan hasil observasi untuk memastikan konsistensi temuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teoritis: Persepsi, Poligami, dan Kesetaraan Gender

Persepsi merupakan proses kognitif yang melibatkan penerimaan, pemilahan, pengorganisasian, dan interpretasi individu terhadap suatu fenomena berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai yang dianut (Robbins & Judge, 2013). Dua individu yang menghadapi situasi yang sama sangat mungkin memiliki persepsi yang berbeda karena persepsi bukan sekadar cerminan objektif dari realitas, melainkan merupakan konstruksi subjektif. Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 3, 4, dan 5 yang mensyaratkan keadilan bagi semua pihak, persetujuan istri, dan kemampuan ekonomi suami. Bagi umat Islam, poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menegaskan kewajiban memperoleh izin Pengadilan Agama. Namun, dalam praktiknya banyak kasus poligami dilakukan tanpa prosedur hukum yang semestinya (Mulia, 2007).

Kesetaraan gender adalah keadaan di mana pria dan wanita memiliki hak, peluang, akses, dan partisipasi yang setara di berbagai aspek kehidupan. Terdapat perbedaan jelas antara konsep seks dan gender: seks merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat alami, sedangkan gender adalah hasil konstruksi sosial. Dalam konteks yang lebih luas, terdapat konsep maskulinitas hegemonik (*hegemonic masculinity*), yaitu pola praktik sosial yang memungkinkan dominasi pria atas wanita untuk tetap ada (Connell, 2005). Poligami dapat dilihat sebagai ekspresi dari struktur maskulinitas hegemonik yang secara sistematis menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Salah satu sudut pandang teoritis yang paling berpengaruh dalam studi gender saat ini adalah argumen bahwa gender merupakan hasil konstruksi sosial, bukan sesuatu yang bersifat alami. Gender tidak merupakan identitas yang secara esensial melekat pada individu, melainkan sesuatu yang dilakukan (*performed*) melalui pengulangan berbagai tindakan, ekspresi, dan praktik sosial tertentu (Butler, 2004). Pandangan ini memiliki dampak yang signifikan: jika gender merupakan hasil dari konstruksi sosial, maka hal itu bisa dan seharusnya diubah ketika menciptakan ketidakadilan.

Dalam bidang hukum, terdapat perbedaan penting antara *das sollen* dan *das sein* yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara norma yang seharusnya ada dan kenyataan yang terjadi. Dalam aspek *das sollen*, poligami di Indonesia diatur secara ketat dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Namun dalam aspek *das sein*, berbagai penelitian menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara ketentuan normatif dan praktik yang nyata (Soekanto, 2012).

Deskripsi Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (UNIMED). Kurikulum Jurusan PPKn yang memuat materi tentang hak warga negara, demokrasi, dan keadilan sosial secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada pembentukan perspektif kritis mahasiswa terhadap fenomena sosial, termasuk praktik poligami. Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang mahasiswa yang terbagi dalam dua angkatan, yaitu 10 mahasiswa Angkatan 2024 dan 10 mahasiswa angkatan 2025. Seluruh informan berada dalam rentang usia 18-21 tahun, termasuk dalam kategori generasi Z yang ditengarai memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap isu-isu kesetaraan dan hak-hak individu (Twenge, 2019).

Tabel 1 Profil Informan Penelitian

No	Informan	Angkatan	Keterangan
1	Responden 1	2024	Angkatan Pertama
2	Responden 2	2024	Angkatan Pertama
3	Responden 3	2024	Angkatan Pertama
4	Responden 4	2024	Angkatan Pertama
5	Responden 5	2024	Angkatan Pertama
6	Responden 6	2024	Angkatan Pertama
7	Responden 7	2024	Angkatan Pertama
8	Responden 8	2024	Angkatan Pertama
9	Responden 9	2024	Angkatan Pertama
10	Responden 10	2024	Angkatan Pertama
11	Responden 11	2025	Angkatan Kedua
12	Responden 12	2025	Angkatan Kedua
13	Responden 13	2025	Angkatan Kedua
14	Responden 14	2025	Angkatan Kedua
15	Responden 15	2025	Angkatan Kedua
16	Responden 16	2025	Angkatan Kedua
17	Responden 17	2025	Angkatan Kedua
18	Responden 18	2025	Angkatan Kedua
19	Responden 19	2025	Angkatan Kedua
20	Responden 20	2025	Angkatan Kedua

Persepsi Mahasiswa Terhadap Poligami dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Dimensi pertama mengkaji persepsi mahasiswa Jurusan PPKn UNIMED terhadap poligami dari sudut pandang kesetaraan gender sebagai konstruksi sosial. Berdasarkan hasil pengisian angket dari 20 informan, diperoleh rata-rata skor dimensi persepsi sebesar 3,66 dari skala maksimal 5,00. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa memiliki persepsi yang tergolong tinggi terhadap poligami sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Sebagian besar informan menyatakan bahwa poligami mencerminkan ketidaksetaraan dalam relasi laki-laki dan perempuan serta berpotensi memperkuat posisi subordinat perempuan dalam struktur sosial. Dari perspektif teoritis, persepsi kritis ini dapat dipahami melalui kerangka teori gender sebagai konstruksi sosial (Butler, 2017). Ketika mahasiswa memperoleh pendidikan yang memperkenalkan perspektif kritis terhadap norma gender, mereka cenderung mengevaluasi ulang norma-norma tersebut dan mengembangkan pandangan yang lebih egaliter.

Tabel 2 Rata-Rata Skor Dimensi Persepsi Terhadap Poligami per Angkatan

Pernyataan	Rata-rata 2024	Rata-rata 2025	Rata-rata Keseluruhan
Poligami bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender	4,20	4,20	4,20
Poligami mencerminkan ketimpangan relasi gender	3,70	3,70	3,70
Poligami tidak dapat diterima meski ada syarat keadilan	1,90	1,70	1,80
Poligami memperkuat subordinasi perempuan	4,20	4,30	4,25
Poligami mencerminkan maskulinitas hegemonik	4,40	4,30	4,35
Rata-rata Dimensi Persepsi	3,68	3,64	3,66

Menariknya, pernyataan mengenai penerimaan poligami dengan syarat keadilan mendapatkan skor paling rendah (1,80). Temuan ini konsisten dengan argumentasi Musdah Mulia (2017) bahwa wacana keadilan dalam poligami kerap digunakan sebagai legitimasi normatif, namun dalam praktiknya sulit diwujudkan karena dimensi emosional dan psikologis tidak dapat diukur secara objektif.

Sikap Mahasiswi Terhadap Poligami (Dimensi Nilai)

Dimensi kedua mengukur kecenderungan sikap mahasiswi terhadap poligami, khususnya apakah mereka cenderung menolak atau menerima praktik tersebut tanpa dasar justifikasi normatif yang sah. Hasil analisis menunjukkan rata-rata skor dimensi sikap sebesar 3,77 dari skala maksimal 5,00, yang termasuk dalam kategori tinggi. Sebanyak 19 dari 20 informan (95%) menunjukkan sikap penolakan terhadap poligami. Tidak ditemukan satu pun informan yang secara tegas mendukung atau menerima poligami.

Tabel 3 Distribusi Sikap Informan Terhadap Poligami

Kategori Sikap	Angkatan 2024	Angkatan 2025	Total	Persentase
Sangat Menolak (skor = 5)	6	5	11	55%
Menolak (skor = 4)	3	5	8	40%
Netral (skor = 3)	1	0	1	5%
Menerima (skor ≤ 2)	0	0	0	0%
Total	10	10	20	100%

Tingginya persentase penolakan (95%) ini melampaui temuan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Mubasyaroh (2019) menemukan bahwa sekitar 78% mahasiswi menyatakan penolakan terhadap poligami, sementara penelitian Syarifuddin dan Wardani (2021) melaporkan angka penolakan sebesar 81%. Tingginya angka penolakan dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan karakteristik khusus Jurusan PPKn yang secara kurikulum lebih banyak memaparkan mahasiswi pada diskursus hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perspektif kritis terhadap norma-norma yang berlaku. Sebagian besar informan menyatakan bahwa penolakan mereka terhadap poligami bukan semata-mata karena alasan emosional, melainkan didasari oleh pemahaman kritis terhadap dampak poligami bagi kesejahteraan perempuan. Beberapa informan secara eksplisit menyebutkan bahwa konsep keadilan yang menjadi syarat normatif poligami tidak dapat diwujudkan secara objektif, terutama dalam dimensi emosional.

Pengaruh Pendidikan Gender terhadap Persepsi Mahasiswi

Dimensi ketiga mengkaji sejauh mana pendidikan gender yang diterima mahasiswi di lingkungan perguruan tinggi berpengaruh terhadap pembentukan persepsi mereka mengenai poligami. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata skor dimensi pengaruh pendidikan gender sebesar 4,31 dari skala maksimal 5,00, yang tergolong tinggi. Ini merupakan skor tertinggi di antara ketiga dimensi yang diukur, menunjukkan bahwa informan secara kuat mengakui peran pendidikan gender dalam membentuk cara pandang kritis mereka.

Tabel 4 Rata-Rata Skor Dimensi Pengaruh Pendidikan Gender per Angkatan

Indikator Pendidikan Gender	Rata-rata 2024	Rata-rata 2025	Rata-rata Total
Pendidikan gender meningkatkan kesadaran terhadap ketidakadilan	4,40	4,30	4,35
Semakin tinggi pemahaman gender, semakin kritis memandang poligami	4,30	4,20	4,25
Pendidikan gender memperkuat pemahaman hak-hak perempuan	4,50	4,40	4,45
Mata kuliah gender memperluas wawasan kritis mahasiswi	4,20	4,20	4,20
Pendidikan gender mendukung cara pandang yang emansipatif	4,40	4,20	4,30
Rata-rata Dimensi Pendidikan Gender	4,36	4,26	4,31

Indikator dengan skor tertinggi adalah "pendidikan gender memperkuat pemahaman hak-hak perempuan" (4,45), diikuti oleh "pendidikan gender meningkatkan kesadaran terhadap ketidakadilan" (4,35). Temuan ini memperkuat konsensus yang berkembang dalam literatur pendidikan gender bahwa intervensi pedagogis berbasis perspektif gender mampu mengubah orientasi sikap dan nilai secara signifikan (Subramaniam et al., 2018; Yusuf et al., 2022). Mekanisme pengaruh pendidikan gender terhadap persepsi bekerja melalui tiga jalur utama: jalur kognitif (pemberian kerangka konseptual), jalur afektif (pembangunan empati terhadap pengalaman perempuan), dan jalur konatif (pembentukan disposisi kritis terhadap norma tidak adil) (Septiani dan Kusumawati, 2021). Pengaruh ini bersifat multi-kanal dan tidak lagi terbatas pada ruang kelas formal, melainkan juga berasal dari media sosial, diskusi informal, dan pengalaman pribadi.

Perbandingan Persepsi Antargenerasi: Angkatan 2024 dan 2025

Analisis komparatif persepsi antara dua angkatan menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Angkatan 2024 menunjukkan rata-rata skor persepsi sebesar 3,68, sikap sebesar 3,80, dan pengaruh pendidikan gender sebesar 4,36. Sementara itu, angkatan 2025 menunjukkan rata-rata skor persepsi sebesar 3,64, sikap sebesar 3,75, dan pengaruh pendidikan gender sebesar 4,26.

Tabel 5 Rekapitulasi Perbandingan Rata-Rata Skor per Angkatan

Dimensi	Angkatan 2024	Angkatan 2025	Keseluruhan
Persepsi terhadap Poligami	3,68	3,64	3,66
Sikap terhadap Poligami	3,80	3,75	3,77
Pengaruh Pendidikan Gender	4,36	4,26	4,31

Perbedaan tipis yang ada dapat dijelaskan oleh perbedaan durasi paparan akademik: angkatan 2024 yang telah memasuki tahun kedua perkuliahan tentu telah mengikuti lebih banyak mata kuliah bermuatan perspektif gender, sehingga internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender yang mereka miliki lebih mendalam. Konsistensi temuan antargenerasi mengindikasikan adanya internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender yang terbentuk secara konsisten, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui proses sosialisasi yang lebih luas, termasuk melalui media digital (Putri dan Herdiansah, 2022).

Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Perspektif Mahasiswi

Penelitian ini juga menemukan bahwa mahasiswi mampu mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik poligami. Sebagian besar informan mengakui bahwa secara normatif, regulasi poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang mensyaratkan keadilan, namun dalam kenyataannya syarat tersebut sangat sulit dipenuhi, terutama dalam aspek emosional dan psikologis yang tidak dapat dikuantifikasi. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam konteks poligami dapat dijelaskan melalui konsep *legal pluralism*: di Indonesia, hukum negara, hukum agama, dan norma adat beroperasi secara bersamaan dan sering kali saling bertentangan dalam mengatur praktik pernikahan. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan, serta kekuatan budaya

patriarkal merupakan faktor-faktor utama yang membuat ketentuan mengenai poligami tidak dapat diterapkan secara efektif (Soekanto, 2012).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, mahasiswi Jurusan PPKn UNIMED angkatan 2024 dan 2025 secara dominan memandang poligami sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Dengan rata-rata skor dimensi persepsi sebesar 3,66 dari skala maksimal 5,00 yang tergolong tinggi, sebagian besar informan menilai bahwa poligami mencerminkan ketimpangan relasi gender, memperkuat subordinasi perempuan, serta merupakan ekspresi dari struktur maskulinitas hegemonik yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan.

Kedua, sebanyak 19 dari 20 informan atau 95% mahasiswi menunjukkan kecenderungan menolak praktik poligami ketika dikaji tanpa justifikasi normatif agama maupun budaya. Rata-rata skor dimensi sikap sebesar 3,77 yang tergolong tinggi mempertegas temuan ini. Tidak ditemukan satu pun informan yang secara tegas menyatakan menerima atau mendukung poligami. Penolakan tersebut bukan semata bersifat emosional, melainkan dilandasi oleh pemahaman kritis terhadap dampak poligami bagi kesejahteraan perempuan secara psikologis, emosional, dan sosial.

Ketiga, pendidikan gender terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi kritis mahasiswi terhadap poligami. Rata-rata skor dimensi pengaruh pendidikan gender sebesar 4,31 menunjukkan bahwa mahasiswi mengakui peran penting pendidikan gender dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap ketidakadilan berbasis gender, memperkuat pemahaman tentang hak-hak perempuan, serta mendorong cara pandang yang lebih emansipatif. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa lingkungan akademik yang responsif gender berpotensi besar membentuk generasi muda sebagai agen perubahan sosial yang berkomitmen pada keadilan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar perguruan tinggi, khususnya Jurusan PPKn UNIMED, terus mendorong mahasiswi mengembangkan cara pandang kritis terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan relasi gender. Integrasi materi gender dalam kurikulum perlu diperkuat secara sistematis, terutama bagi angkatan yang lebih baru. Penegakan hukum terkait regulasi poligami juga perlu diperkuat agar kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dapat diminimalkan demi perlindungan hak-hak perempuan yang lebih efektif.

V. REFERENSI

- Abdullahi, A., & Hassan, S. U. N. (2019). Gender equality perceptions among university students: A systematic review. *Journal of Gender Studies*, 28(5), 578-591.
- Afifah, N., & Nisa, E. F. (2022). Interseksionalitas dan pengalaman perempuan dalam poligami: Kajian feminist critical discourse analysis. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 9(1), 45-62.
- Arifin, Z., & Nurhayati, S. (2021). Persepsi mahasiswi perguruan tinggi Islam terhadap poligami dalam perspektif kesetaraan gender. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 210-230.
- Butler, J. (2017). *Undoing gender* (2nd ed.). Routledge.
- Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2019). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. *Gender & Society*, 19(6), 829-859.
- Connell, R. W. (2016). *Masculinities* (3rd ed.). University of California Press.
- Darmawan, A., Sari, I. P., & Wahyuni, T. (2022). Legal pluralism and polygamy practices in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 1-24.
- Dwi Yanthi, N. L. P., & Pujaastawa, I. B. G. (2018). Pemahaman gender mahasiswi dan korelasinya dengan lama studi di perguruan tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 174-185.
- Hasan, M. F., Pratiwi, D. A., & Suryani, R. (2020). Pembentukan sikap mahasiswi terhadap kesetaraan gender: Kajian teori sikap Ajzen dalam konteks pendidikan tinggi. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 6(2), 88-99.
- Hasyim, F., & Latif, A. (2020). Comparative study of female students' perception on polygamy across social science and exact science departments. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 265-284.
- Hidayati, N. (2018). Efektivitas penegakan hukum poligami dan perlindungan hak perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 265-284.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Islami, N. (2023). Gender as social construction and female university students' perception of polygamy in Indonesia. *Journal of International Women's Studies*, 24(3), 1-18.
- Kabeer, N. (2016). Gender equality, economic growth, and women's agency. *Feminist Economics*, 22(1), 295-321.
- Khoirunnisa, A., & Sari, M. P. (2021). Perubahan persepsi kolektif sebagai prasyarat reformasi hukum keluarga yang responsif gender di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 113-130.
- Mahmuda, S., Andriani, R., & Widodo, H. (2020). Efektivitas pembelajaran berbasis perspektif gender di perguruan tinggi Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 141-158.

- Manalu, D., & Siagian, H. (2022). Paparan wacana kesetaraan gender dan hubungannya dengan sikap kritis mahasiswi di Universitas Negeri Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 52-68.
- Mubasyaroh, M. (2019). Pandangan mahasiswi perguruan tinggi Islam tentang poligami. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 18(1), 97-116.
- Mulia, S. M. (2017). Islam dan inspirasi kesetaraan gender (Edisi revisi). Kibar Press.
- Nurhidayah, R., & Farid, M. (2021). Implementasi hukum poligami di Indonesia: Antara norma dan realitas. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), 29-48.
- Priyanto, A., & Wulandari, T. (2022). Teori strukturasi Giddens dan reproduksi ketidakadilan gender dalam institusi pernikahan. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 6(1), 1-16.
- Putri, A. R., & Herdiansah, A. G. (2022). Generasi Z, media sosial, dan pembentukan kesadaran gender. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 49-64.
- Rahmadhani, F., Hasanah, U., & Sari, D. P. (2023). Peran lingkungan kampus dalam membentuk orientasi gender mahasiswi. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Septiani, E., & Kusumawati, D. (2021). Jalur kognitif, afektif, dan konatif dalam pembentukan sikap gender. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 6(1), 21-35.
- Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajagrafindo Persada.
- Subramaniam, M., Mohd Noor, N., & Alias, N. A. (2018). Gender education and attitude change: Evidence from Malaysian higher education institutions. *Asian Journal of University Education*, 14(2), 1-14.
- Syarifuddin, M., & Wardani, N. (2021). Sikap mahasiswi jurusan ilmu sosial terhadap poligami. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 13(1), 65-80.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- Wijayanti, R., & Purnomo, H. (2020). Pendidikan gender di perguruan tinggi Indonesia: Kajian kurikulum dan implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 67-84.
- Yusuf, M., Pratiwi, R., & Kurniawan, A. (2022). Korelasi pendidikan gender dengan sikap kritis perempuan terhadap praktik sosial diskriminatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 201-218.
- Suriati, S. (2025). Analisis Program Guru Asuh Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Bagi Siswa SMPN 5 Sabang. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 10(1), 28-28.